

BERNEGARA ITU TIDAK MUDAH

(DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM)

Yang saya Hormati dan saya Muliakan,
Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro,
Sekretaris Senat Universitas Diponegoro,
Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,
Para Anggota Senat dan Senat Guru Besar Universitas
Diponegoro,
Gubernur dan Muspida Provinsi Jawa Tengah,
Walikota dan Muspida Kota Semarang,
Para Pejabat Sipil dan Militer,
Para Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga di
Lingkungan Universitas Diponegoro,
Para Pembantu Dekan, Ketua Bagian, Dosen dan Karyawan di
Lingkungan Universitas Diponegoro,
Para Mahasiswa sekalian, khususnya dari Fakultas Hukum baik
Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) maupun Program
Doktor (S3) yang saya banggakan,
Para sesepuh, pinisepuh dan Senior, kerabat dan handai taulan,
serta para undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan,

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam merdeka untuk kita
semua.

Pertama dan yang paling utama, saya ingin mengucapkan
rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. atas limpahan
berkah, nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi ini
kita bisa hadir bersilaturahmi bersama, dalam keadaan sehat
wal'afiat dan dalam suasana yang berbahagia, untuk menghadiri
acara yang sangat mulia ini, yaitu upacara penerimaan Jabatan

Guru Besar secara resmi kepada saya, dalam forum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada forum pagi ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan yang telah cukup lama tertunda sebagai bentuk awal pertanggungjawaban saya dalam menerima jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, utamanya dalam bidang Hukum Tata Negara atau di bidang Hukum dan Politik, dengan tema yang mungkin akan dipandang bersifat pesimistik, meskipun saya sangat optimis bahwa bangsa Indonesia akan mampu untuk bernegara dengan baik dan benar berdasarkan hukum yang adil dan politik yang santun. Mengawali pidato ini pula, marilah kita bersama-sama melakukan introspeksi, berkontemplasi, merenung, berpikir secara serius tentang masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekarang ini kita hidup di Abad ke-21, suatu kehidupan di abad yang tidak menentu dengan usia dunia yang semakin tua, yang ditandai dengan berbagai kelangkaan dan semakin menipisnya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan hidup. Saling ketergantungan antarnegara, konflik-konflik kepentingan, konflik-konflik dengan kekerasan dalam memperebutkan sumber daya alam semakin meningkat pula. Semula ketegangan terjadi antara Blok Barat dengan Blok Timur, berkembang menjadi ketegangan antara negara-negara Utara dan Selatan, yang sekarang telah semakin berkembang menjadi ketegangan-ketegangan di semua wilayah di bumi ini. Berbagai kesulitan dan konflik muncul baik di dalam ranah lokal, nasional, regional bahkan sampai pada tingkat global, yang memunculkan

sikap egoistik, saling tidak percaya, saling berebut dan saling memusnahkan satu sama lain, sehingga jauh dari sikap gotong royong, kerja sama, bersinergi untuk menyelesaikan konflik dan keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut.

Dalam kajian teori bernegara, munculnya situasi dan kondisi yang kritis tersebut dapat berdampak pada eksistensi negara yaitu ada negara yang menjadi pemenang (*the winners*) dan ada pula negara yang kalah (*the losers*) dalam persaingan tersebut, yang secara teoretis memunculkan teori asal mula negara atau teori muncul dan tenggelamnya suatu negara. Kita sekalian berharap, Indonesia sebagai negara akan tetap eksis dalam situasi persaingan global di berbagai bidang kehidupan ini, bahkan kita harus berani bermimpi dengan optimis bahwa sebagai negara dan bangsa, Indonesia akan mencapai kejayaannya pada Abad ke-21 ini.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Perkenankanlah saya menyampaikan isi pidato yang berjudul :

BERNEGARA ITU TIDAK MUDAH (DALAM PERPEKTIF POLITIK DAN HUKUM)

I. Pendahuluan.

Bernegara, dalam arti menjalankan negara dan roda pemerintahan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya memang tidak semudah seperti dalam teori-teori yang ada di dalam buku. Istilah Negara (*state*) dapat dimaknai dalam dua arti yaitu bahwa, negara merupakan masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis, dan negara merupakan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan

demikian menguasai wilayah itu. Negara dalam arti yang kedua adalah lembaga pusat pemersatu suatu masyarakat.

Sebagai sebuah konstruksi politik baru yang bersifat artifisial, negara modern yang baru muncul pada Abad ke-18 di Eropa merupakan sebuah institusi politik yang diciptakan dengan sengaja dan secara rasional, tumbuh menjadi sebuah kekuasaan politik yang dominan, hegemonik, mengintervensi, menggerakkan masyarakat dan menumbangkan tatanan sosial politik yang telah ada sebelumnya. Lahirnya konsep kedaulatan negara disebabkan pada satu wilayah hanya ada satu kekuasaan yang diakui sebagai penguasa tunggal yaitu kekuasaan negara. Meskipun demikian, hal tersebut dalam praktek mengalami pasang surut karena ternyata negara modern tidak dapat menggusur tatanan asli yang telah ada sebelumnya. Hal ini berlangsung terus selama ratusan tahun, hingga muncul kekuatan-kekuatan lain yang menandingi dominasi dan hegemoni negara modern, sehingga monopoli kekuasaan oleh negara secara perlahan-lahan tersebar pada institusi-institusi lain di luar negara.

Kondisi tersebut disebabkan oleh dua hal yang mendasar. Penyebab pertama adalah ketidakmampuan negara sendiri di dalam menjalankan dan mewujudkan kekuasaannya yang begitu besar, disebabkan oleh ketiadaan atau belum adanya institusi publik dan tatanan yang dibutuhkan. Penyebab kedua adalah munculnya globalisasi. Sebagaimana diketahui bahwa memasuki Abad ke-21, tatanan kehidupan umat manusia mengalami perubahan yang cepat karena terjadinya globalisasi (yang disebabkan oleh terjadinya revolusi di bidang teknologi transportasi dan telekomunikasi, serta perkembangan turisme) (Dorodjatun Kuntjorojakti sebagaimana

dikutip Riant Nugroho dan Marco P. Sumampouw, 1997) yang telah membawa perubahan mendasar baik dalam hubungan internasional maupun politik ekonomi domestik negara-negara di dunia, yang ditandai oleh munculnya *non-state actor* dan keterkaitan yang kompleks antara isu-isu politik dan ekonomi.

Perkembangan teknologi transportasi telah melahirkan era *the end of geography*, karena pergerakan arus manusia dan barang menjadi sangat cepat dan perpindahan arus modal antarkawasan atau antarnegara menjadi semakin mudah. Investasi, baik riil maupun portofolio, tidak lagi mengenal bendera nasional. Ia menerobos dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu negara ke negara lain yang lebih menguntungkan. Perkembangan teknologi telekomunikasi melahirkan era *the end of timelines*, karena telah memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dari satu belahan dunia dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang dari belahan dunia yang lain tanpa hambatan waktu, transportasi, akomodasi, dan biaya yang besar. Di samping itu, keserempakan komunikasi melalui media televisi via satelit telah memungkinkan sebuah berita bisa diterima oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Sementara perkembangan turisme telah menyebabkan terjadinya peningkatan arus pertukaran manusia yang mengikis hambatan-hambatan sosial, budaya dan politik.

Dalam dunia yang seolah makin kecil dan tanpa batas tersebut, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan mempengaruhi bangsa atau negara lain, dan muncul saling ketergantungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Makna terakhir atau *bottom line* globalisasi tidak lain adalah

persaingan atau *competition* yang kadar dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional (Tanri Abeng, 1997); dan persaingan pada era global ini telah beralih dari persaingan di bidang politik ke persaingan di bidang ekonomi, karena kebijakan-kebijakan politik suatu negara makin lama makin terdesak oleh keinginan pasar global yang dimanifestasikan dalam organisasi global seperti WTO, serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara menjadi satu seperti NAFTA di Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan AFTA di Asia Tenggara, serta ACFTA di kawasan Asia Tenggara.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Globalisasi mempunyai pengertian yang sangat kompleks, tetapi secara sederhana globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global (Mansour Fakih, 2002). Globalisasi ekonomi yang didasarkan pada ekonomi pasar telah memunculkan persaingan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini setiap negara harus bersaing keras dalam usaha mendapatkan modal bagi pembangunannya. Selain itu, investasi yang dilakukan oleh setiap negara harus menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional, karena hanya produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga paling murah yang laku di pasar. Selain itu, dalam ekonomi global, pengertian asal-muasal suatu produk menjadi kabur karena mata rantai proses produksinya berada di berbagai penjuru dunia. Dan *individual consumers* tidak lagi mempersoalkan dari negara mana produk itu berasal. Sehingga dalam kenyataan persaingan ekonomi global

tidak lagi terjadi antar negara melainkan antar pelaku ekonomi atau perusahaan.

Sebenarnya globalisasi ekonomi yang merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama melalui arus perdagangan dan keuangan, adalah sebuah proses historis yang pada intinya adalah proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang melanda semua masyarakat di berbagai negara dengan mengambil tiga bentuk kegiatan yaitu perdagangan internasional, investasi asing dan aliran pasar modal. Dalam keadaan demikian negara menjadi semakin sulit mempertahankan kebijaksanaan ekonomi yang independen dan otonom. Selain itu, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi juga semakin sulit dilakukan dan menjadi kebijaksanaan ekonomi yang tidak populer. Setiap negara dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi norma-norma ekonomi liberal dan demokrasi. Setiap akses ke lembaga-lembaga ekonomi internasional (seperti IMF dan *World Bank*) selalu dihubungkan dengan berhasil tidaknya negara penerima bantuan membuka pasar domestik dan ekonomi nasional bagi ekonomi internasional. Hal ini merupakan *internationalization of states* atau suatu proses di mana kebijaksanaan ekonomi nasional suatu negara harus disesuaikan dengan tuntutan dan tekanan ekonomi internasional dan aktor eksternal yang lain. Dengan demikian pada akhirnya globalisasi memaksa negara untuk membuat penyesuaian-penyesuaian dengan pilihan yang sangat terbatas (lebih tepatnya tidak ada) yaitu ikut bersaing dalam sistem ekonomi pasar dengan berbagai pendekatan. Dengan lain perkataan globalisasi merupakan suatu pengintegrasian diri ke dalam sistem liberal ekonomi global.

Di sini terbukti bahwa negara memang harus merespons segala situasi atau keadaan yang muncul atau terjadi yang dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas hidup warga negaranya, sesuai dengan faham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang membenarkan negara ikut campur dalam segala bidang kehidupan demi menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara tidak bisa lagi hanya sekedar menjadi penjaga malam (*nachtwakersstaat*) yang hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, agar akibat-akibat yang sudah dan akan ditimbulkan oleh globalisasi (sebagaimana dulu juga pernah ditimbulkan oleh industrialisasi seperti terciptanya jurang yang lebar dalam masyarakat dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok) dapat diatasi dan dicegah atau diminimalisir kemungkinan terjadinya.

Berbeda dari bidang ekonomi, pengaruh globalisasi informasi dan ekonomi dalam bidang politik masih dilihat dengan sikap curiga. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dikarenakan proses globalisasi telah membawa internasionalisasi serta penyebaran pemikiran dan nilai-nilai demokrasi, termasuk di dalamnya masalah HAM. Muncul kecurigaan bahwa demokratisasi dan HAM merupakan upaya dari negara-negara besar untuk menekan negara-negara berkembang, meski dalam realitanya penyebaran ide demokrasi dan HAM tidak dapat dibendung oleh pemerintah. Hal kedua yang menyebabkan pemerintah suatu negara curiga terhadap implikasi politik dari globalisasi adalah semakin berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mempertahankan loyalitas individu warganegara, karena globalisasi informasi dan telekomunikasi telah membuat individu dan kelompok dapat bergerak keluar dari batas-batas geografis.

Globalisasi dengan cara atau pola yang tidak berbentuk dan tidak terarah seperti sekarang juga menyebabkan negara-negara berkembang sulit untuk berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan adanya kekuatan tersembunyi di balik globalisasi (yang sebenarnya merupakan kapitalisme, yang pada perkembangannya yang terakhir merupakan neoliberalisme) tersebut yang tidak lain adalah “kebijakan dan kontrol” negara-negara maju, sebagaimana dikatakan oleh Henry Veltmeyer yang menyatakan bahwa globalisasi yang disponsori terutama oleh AS tersebut adalah sebuah pengejawantahan imperialisme ekonomi. Hal ini dikarenakan tiga ciri imperialisme dan kolonialisme tempo dulu yaitu: 1) ada kesenjangan kemakmuran antara negara penjajah dan negara terjajah; 2) hubungan antara kaum penjajah dan kaum terjajah adalah hubungan yang bersifat eksploitatif atau bersifat menindas; dan 3) negara terjajah, sebagai pihak yang lemah, kehilangan kedaulatan dalam arti luas (Mohammad Amien Rais, 2008).

Ciri-ciri tersebut dalam kenyataannya juga terjadi pada era global, hanya saja kesenjangan dan hubungan yang bersifat eksploitatif tersebut tidak lagi terjadi antara negara penjajah dengan negara terjajah melainkan antara negara kaya atau maju dengan negara miskin atau terbelakang. Demikian juga hilangnya kedaulatan tidak lagi dialami oleh negara terjajah melainkan oleh negara miskin atau terbelakang. Dengan demikian, globalisasi dan pasar bebas dapat dipastikan juga akan menghasilkan penghisapan dan penindasan, tentu saja dalam bentuknya yang lebih canggih sehingga seringkali membuat orang yang tertindas sendiri merasa senang dan bahagia.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Sementara itu bahaya akan adanya persaingan bebas yang hanya akan memenangkan pihak yang kuat saja (*free fight competition and survival of the fittest*), dan yang pada tahap berikutnya akan menjadikan jenjang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin menjadi semakin lebar, sudah tampak di depan mata. Dengan demikian, disadari atau tidak globalisasi tidak selalu membawa manfaat bagi semua orang, bahkan untuk hal-hal yang memang terbukti menghasilkan manfaat saja selalu ada sekelompok orang, bangsa atau negara yang dirugikan. Mereka inilah korban globalisasi. Disadari atau tidak, kemiskinan global, hilangnya hak untuk mendapatkan pendidikan, gizi buruk dan sebagainya merupakan imbas dari tata dunia yang tidak memberikan ruang bermain yang sama atau seimbang dan tempat yang berkeadilan bagi seluruh penduduk dunia. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas karena eksploitasi oleh manusia dan prediksi akan terjadinya bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim berupa pemanasan global (*global warming* atau *climate change*) telah menimbulkan kekhawatiran seluruh penduduk dunia, tidak hanya dari negara-negara miskin tapi juga negara-negara industri, dan hal ini telah memicu ketegangan dan konflik-konflik untuk memperebutkan sumber daya alam yang masih ada. Belum lagi masalah kekurangan air, pangan dan energi.

Dengan lebih jelas, dapat dikatakan bahwa globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi adalah terciptanya kesejahteraan bagi negara-negara yang siap dan dapat memanfaatkan peluang yang muncul pada era global, munculnya kesempatan yang luar biasa, demokratisasi di

berbagai negara, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, serta perhatian yang lebih besar pada pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan, terjadinya erosi budaya yang luar biasa, disintegrasi, penyakit menular, dan kejahatan-kejahatan transnasional terorganisasi yang dapat disebut sebagai bahaya keamanan non-tradisional seperti *trafficking*, perdagangan narkoba, perdagangan senjata api, terorisme, *illegal logging*, dan perompakan di laut, yang pada hakekatnya dapat dikatakan merupakan globalisasi kejahatan. Globalisasi juga membawa dampak positif karena dengan adanya globalisasi, budaya milik semua bangsa di dunia dibawa untuk saling mendekat dan informasi-informasi mengenai politik, ekonomi, pengetahuan, olah raga dan hiburan dapat disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Demikian pula, dengan semakin mudahnya komunikasi global tidak ada lagi pemerintah suatu negara yang dapat menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan di negaranya. Berarti dampak positif globalisasi tidak dapat disangkal oleh siapapun. Namun demikian, ada yang harus dikritisi dari globalisasi yaitu sifatnya yang spekulatif yang telah mengubah sistem keuangan dunia menjadi layaknya arena judi berskala global yang dapat menyebabkan krisis keuangan yang dahsyat sebagaimana pernah terjadi di negara-negara Asia pada medio tahun 1997. Selain itu juga penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam rangka efisiensi penggunaan tenaga kerja ketika negara-negara yang masih dalam posisi tertinggal

sedang menghadapi ledakan jumlah penduduk, telah menimbulkan kekhawatiran.

Hal tersebut menyadarkan bangsa-bangsa bahwa setiap negara tidak mungkin menyelesaikannya sendiri, oleh karena itu harus ada usaha bersama dan kerjasama internasional (*Mutual Legal Assistance/MLA*) seperti *joint investigation*, pengumpulan data bersama, dan *training*/pelatihan bersama untuk menghadapi dan menanggulangi bahaya-bahaya besar dan kejahatan-kejahatan internasional.

Dengan meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Oswaldo de Rivero (2008), saat ini dunia sedang dihadapkan pada semacam "Hukum Perolehan Kekuatan Nasional Yang Makin Mengecil", karena secara bertahap mayoritas negara-negara yang merdeka pada Abad 19 (seperti negara-negara Amerika Latin) telah kehilangan kekuasaan yang pernah dimiliki, dan negara-negara yang pada Abad 20 baru saja lepas dari belenggu penjajahan (seperti sebagian besar negara Asia kecuali China, India, Pakistan, Taiwan dan Korea Selatan, serta Afrika) ternyata terlahir tanpa memiliki kemampuan nasional untuk berkembang. Selain itu ternyata selama lebih dari satu abad terakhir tidak ada perubahan kekuatan di dunia. Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Rusia dan Italia tetap berada dalam golongan negara kuat sejak Abad 19. Realitanya banyak negara mengalami kekalahan dalam perlombaan sejarah tidak hanya karena gagal untuk berkembang dan ikut menjadi bagian dari kekuatan dunia, tetapi juga karena mereka kehilangan kemampuan nasionalnya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam

perekonomian global dan kemajuan teknologi. Dan hal yang sangat mengejutkan adalah bahwa ternyata yang kehilangan kekuatan nasional tidak hanya negara-negara tertinggal saja tetapi juga negara-negara kuat di belahan dunia Barat saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengatur dunia, apalagi menciptakan suatu tata dunia baru atau memiliki kapasitas untuk membawa dunia pada suatu keteraturan. Era stabilitas strategis pada masa Perang Dingin saat ini telah menjadi era ketidakteraturan dunia yang sangat tidak stabil atau era barbarisme modern. Konflik-konflik sosial politik yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak dapat lagi diselesaikan dengan todongan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet (yang telah pecah menjadi beberapa negara) saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengontrol konflik-konflik yang terjadi, yang biasanya dilakukan supaya tidak berubah menjadi konfrontasi secara langsung antar keduanya. Negara-negara adikuasa mengalami kesulitan dalam melakukan intervensi militer untuk menegakkan tatanan dunia atau tidak mempedulikan tatanan dunia bukan karena tidak adanya ambisi politik, tetapi lebih karena merupakan konsekuensi dari peradaban dunia, untuk memancing rasa hormat dari negara bangsa lain dan untuk melindungi jumlah suara nasional mereka. Situasi dan kondisi dunia saat ini merupakan refleksi atau cermin dari “kebijakan tanpa pedang atau kebijakan intervensi tanpa korban” atau memudarnya kebijakan yang berlandaskan kekuatan dari negara-negara adikuasa. Hal ini membuktikan terbenamnya negara-bangsa dan negara adikuasa.

II. Melemahnya Peran Institusi Negara dan Munculnya Peran Institusi di Luar Negara

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Jatuhnya negara-bangsa tidak hanya disebabkan oleh terkikisnya kekuatan negara-negara adikuasa serta usaha kota-kota dan daerah-daerah untuk mendapatkan kemakmuran melalui globalisasi, tetapi juga karena mereka telah dilemahkan sedemikian rupa oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Bersama-sama dengan lembaga keuangan global (IMF dan World Bank) dan WTO (*World Trade Organization*), perusahaan multi nasional telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global

Saat ini negara-negara adikuasa hanya berfungsi sebagai manajer yang efisien yang bertugas melakukan liberalisasi, deregulasi, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan keamanan kawasan agar tercipta iklim kondusif bagi perusahaan-perusahaan transnasional. Harga yang harus dibayar adalah hilangnya kekuasaan nasional dan pengawasan yang demokratis terhadap perekonomian nasional, atau melemahnya kapitalisme nasional dan dengan demikian juga demokrasi, yang merupakan dua fondasi dari suatu negara-bangsa yang modern.

Sebagai konsekuensi dari semakin menurunnya kekuasaan negara-bangsa dan negara adikuasa, proteksi di bidang ekonomi yang dulu dilakukan dengan cara menguatkan peran negara, saat ini diubah dengan cara mengintegrasikan perekonomian nasional yang kompetitif ke dalam perekonomian global. Hal ini menjadi sebab banyak kota dan daerah di negara-negara kaya membawa aktivitasnya ke tataran internasional melalui

interaksi dengan pihak asing sehingga secara bertahap akan memiliki otonomi. Sebagai contoh Hongkong dan Guangzhou yang memiliki otonomi yang cukup besar dan lebih terhubung dengan dengan perekonomian global daripada Beijing. Hal semacam ini juga terjadi di Eropa. Tidak berfungsinya negara-bangsa telah menyadarkan beberapa kota seperti Lyon dan Milan untuk melepaskan diri dari kontrol Perancis dan Italia dengan melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak luar negeri sehingga saat ini dapat berkembang menjadi pusat perekonomian otonom yang dinamis di Eropa. Ini merupakan indikasi bahwa kota besar akan menjadi pelaku atau aktor penting dalam bidang ekonomi, dan melalui diplomasi mikro akan semakin melemahkan kekuasaan negara-bangsa. Dan fenomena baru berupa disintegrasi negara-bangsa diyakini akan membawa kemakmuran karena perdagangan dunia akan dapat bekerja dengan efisien. Hal memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian dari semua negara yang ada adalah bahwa sehubungan dengan semakin membesarnya kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional adalah munculnya anggapan pada mereka bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab internasional.

Hilangnya dimensi kenegaraan di dunia sekarang ini sebagai akibat dari kegagalan beberapa negara dan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi kenegaraan dan pemerintahannya tersebut telah membuat negara menjadi "negara yang lemah" dan menjadi "sumber dari banyak masalah serius" yang muncul di dunia, padahal kedaulatan sebuah negara menjadi tidak berarti apabila negara itu lemah, sebagaimana pernah dikeluhkan oleh Francis Fukuyama (2005).

Terlepas dari suka atau tidak suka, proses globalisasi - yang menurut Oswaldo de Rivero (2008) sebenarnya hanyalah sebuah mimpi yang diberikan oleh negara-negara yang terlebih dahulu merasakan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan, yang menebarkan pengaruhnya dalam bentuk wacana ideologis dibumbui dengan "hegemoni dan dominasi"- akan terus berlanjut. Demikian pula suka atau tidak suka pula setiap negara harus melakukan usaha-usaha yang bersifat proaktif dan antisipatif agar dapat tetap eksis pada era global yang sangat bercirikan ketergantungan satu sama lain ini. Lebih-lebih secara teoritis kekuatan mekanisme dan institusi pasar ternyata mempunyai dua kelemahan mendasar yaitu: 1) institusi pasar tanpa kehadiran institusi negara atau pengaturan dapat menghasilkan eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan alam dan sosial akibat kegiatan ekonomi; dan 2) institusi pasar tidak dapat mengakomodasi moral karena pelaku-pelakunya hanya bermotifkan profit ekonomi; dan kelemahan mendasar yang kedua ini akan terjadi pada kekuatan pasar global apabila tidak ada institusi pengaturan (*governance*) pada tingkat global, dengan demikian globalisasi yang dicirikan oleh dorongan kekuatan pasar global sangat memerlukan kehadiran institusi kedua (*second institution*) yaitu *governance* pada tingkat global, yang sama kuatnya dengan institusi pasar global itu sendiri (Didik J. Rachbini, 2001).

Di sini terlihat bahwa ketika kemampuan negara untuk melaksanakan pemerintahan telah berubah dan dalam berbagai hal (khususnya dalam manajemen makro ekonomi nasional) menjadi sangat lemah sebagai akibat dari globalisasi, ternyata ia (negara)

tetap merupakan institusi poros yang mempunyai tugas menciptakan kondisi untuk aturan main internasional yang efektif. Fungsi sentral negara-bangsa adalah menjadi legitimasi bagi dan menjamin untuk dapat dipertanggungjawabkannya mekanisme supra-nasional dan sub-nasional. Peranan negara demokrasi sebagai pemilik wilayah tempat ia mengatur penduduknya memberikan padanya legitimasi yang pasti secara internasional yaitu bahwa tidak ada badan lain yang dapat memilikinya sehingga ia dapat berbicara atas nama penduduk itu. Klaim negara-bangsa untuk secara eksklusif melaksanakan pemerintahan secara historis begitu khas dan sama sekali bukan karena takdir. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa era dominasi negara-bangsa sebagai badan pemerintahan sekarang ini telah lewat, dapat dipatahkan. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa jaman negara-bangsa sudah lewat, dan bahwa pemerintah nasional tidak efektif lagi untuk menghadapi proses ekonomi dan sosial yang mengglobal sebagaimana dikemukakan oleh Horsman dan Marshall (1994), serta pendapat yang menganggap negara-bangsa hanya sebagai penguasa lokal dalam sistem global dan tugasnya seperti kotamadya di dalam negara yang hanya menyediakan infrastruktur dan sarana-sarana kepentingan umum yang diperlukan oleh bisnis dengan biaya serendah mungkin sebagaimana dikemukakan oleh Ohmae (1990, 1993) dan Reich (1992), tidak terbukti.

Selain itu, dalam era global peran negara-bangsa tetap dibutuhkan terutama dalam membentuk hukum. Negara akan menentukan ruang lingkup otoritas yang sah dan tindakan yang sah dalam perannya sebagai juru damai dan pembentuk undang-undang berdasarkan konstitusi. Secara eksternal, peranan negara-

bangsa sebagai sumber *rule of law* juga makin penting, karena hukum internasional tidak dapat berfungsi tanpa negara-bangsa. Hukum Internasional mempunyai kelemahan-kelemahan dalam penegakannya sehingga menjadi tidak efektif dan tergantung kepada kekuasaan negara. Dengan demikian eksistensi negara-bangsa tetap penting dan peranannya tetap dibutuhkan bagi suatu perekonomian dan masyarakat yang makin mengglobal.

Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa dalam suasana pergaulan antar negara yang makin terbuka ini, maka belajar dari pengalaman kelompok negara bangsa yang kalah atau *the losers* (yang bercirikan keterbelakangan dan kemiskinan) pada saat terjadi perubahan global pada Abad 18 karena mempunyai cara pandang yang pesimistik sehingga lamban merespons perubahan yang terjadi (*slow adjusters*) (Paul Kennedy, 1995), setiap negara mau tidak mau harus mempersiapkan diri agar bisa berperan aktif dan tetap eksis dalam era global.

III. Demokratisasi dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Hadirin yang saya muliakan,

Diskursus tentang globalisasi yang sering mengemuka di bidang ekonomi dan politik memang cenderung menghasilkan tesis bahwa globalisasi di bidang politik dan ekonomi tersebut memiliki kekuatan yang terbatas dalam mengubah masyarakat di suatu negara, karena dibatasi adanya sistem ekonomi politik negara tersebut yang berfungsi sebagai penyaringnya. Oleh karena itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, semestinya tidak hanya

negara atau pemerintah saja, melainkan seluruh komponen bangsa, termasuk para pelaku ekonomi dan warga masyarakat pada umumnya, harus bersatu-padu dan bahu-membahu bersama pemerintah (Indonesia sebagai sebuah *incorporated*) (Tanri Abeng, 2000; dan Satjipto Rahardjo: 2007, 2008), mempersiapkan diri menghadapi persaingan ekonomi global.

Tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, selain berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan daya saing nasional, baik di bidang permodalan, kemampuan atau penguasaan teknologi, maupun sumber daya manusia. Hal itu disebabkan tersedianya sumber daya alam yang berlimpah, bahan mentah, dan ketersediaan angkatan kerja yang besar dengan upah yang murah tidak dapat lagi dijadikan jaminan untuk mampu memenangkan persaingan ekonomi global. Hal ini dikarenakan globalisasi ekonomi telah mengubah pendekatan “keunggulan komparatif” menjadi “keunggulan kompetitif”. Lebih-lebih dewasa ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan partisipasi dari seluruh komponen bangsa. Selain itu sebagai sebuah negara-bangsa, Indonesia juga tidak ketinggalan dalam ikut mendapat pengaruh dari perubahan politik yang saat ini tengah berlangsung yaitu gelombang demokratisasi yang tengah melanda dunia sejalan dengan globalisasi.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer, banyak dibicarakan orang dan ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dipercaya bahwa demokrasi akan membawa banyak manfaat bagi umat manusia, meski ada implikasi negatifnya karena beayanya yang

mahal dan sangat kompleks dalam pembuatan kebijakan publik dalam rangka mewujudkan demokrasi tersebut. Dan pada Abad 21 ini suatu bangsa baru akan diakui sebagai warga dunia yang *civilized* (beradab) apabila menerima dan mengimpelementasikan sistem pemerintahan demokrasi dalam menata kehidupan kenegaraannya.

Berkaitan dengan demokrasi ini, apabila kita menoleh ke belakang nampak bahwa sejarah umat manusia diwarnai oleh dua gelombang besar politik yaitu gelombang anti demokrasi (yang berkembang setelah usainya Perang Dunia II atau periode 50-an sampai 70-an, yang dipelopori oleh negara bekas Uni Soviet) dan gelombang demokrasi (periode 70-an hingga 90-an). Sebagaimana diketahui bahwa propaganda gencar tentang anti sistem liberalisme-kapitalisme yang dilakukan oleh negara-negara Blok Timur menyebabkan terhambatnya (meskipun tidak sampai mematikan) laju perkembangan demokrasi pada era perang dingin, dan inilah era anti-demokrasi. Meskipun demikian, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi yang ada di dalam faham liberalisme telah memasuki pikiran tokoh-tokoh di negara-negara berkembang dan kemudian ternyata menjadi embrio dari munculnya gelombang demokrasi global yang mendominasi tata kehidupan umat manusia dewasa ini, yang mencapai puncaknya pada tahun 1989 ketika angin politik dunia berubah arah secara drastis sejalan dengan runtuhnya rezim komunis yang diikuti dengan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, pecahnya Uni Soviet, dan hancurnya Pakta Warsawa.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Apakah sesungguhnya demokrasi itu? Demokrasi mengandung dua dimensi pemahaman. Yang pertama yaitu “demokrasi normatif” atau apa yang seharusnya secara idiil akan dilakukan oleh suatu negara, yang biasanya diterjemahkan ke dalam konstitusi masing-masing negara. Dan yang kedua adalah “demokrasi empirik” atau apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan politik suatu negara atau demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis atau *procedural democracy*. Yang jelas adalah bahwa yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat atau *demos*, baik pada tahap *agenda setting* yaitu tahap untuk memilih masalah-masalah apa yang akan dibicarakan dan diputuskan, maupun pada tahap *deciding the outcome* atau pengambilan keputusan. Selain itu ada empat indikator untuk mengetahui apakah sebuah sistem pemerintahan itu demokratis atau tidak, yaitu: akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar (Afan Gaffar, 1999).

Selanjutnya oleh karena setiap bangsa dan negara adalah suatu unikum karena keduanya tertanam dalam habitat tertentu, baik yang fisik maupun sosial (*peculiar form of social life*) (Satjipto Rahardjo, 2008), maka dapat dimengerti bahwa meskipun pemahaman demokrasi bersifat universal tetapi dalam implementasinya ada kemungkinan beradaptasi dengan atau mendapat pengaruh dari nilai-nilai lokal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam implementasi demokrasi di setiap negara. Demikian pula bangsa dan negara Indonesia yang memiliki budaya politik yang khas dalam mempraktekkan sistem

pemerintahan demokrasi, sehingga demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan, demokrasi berkeadaban yang semestinya lebih baik dari pada demokrasi yang dipraktekkan di negara-negara lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, dapat diketahui bahwa NKRI menganut faham demokrasi, atau lebih tepatnya demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Tetapi dalam perjalanan waktu sejak awal kemerdekaan hingga saat ini telah terjadi eksperimentasi demokrasi karena faham demokrasi perwakilan yang diimplementasikan di NKRI terdiri dari berbagai model yang berbeda satu sama lain, yang tidak diikuti dengan pertumbuhan atau perkembangan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.

Pada masa revolusi kemerdekaan (17 Agustus 1945-1950), berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 17 UUD 1945 serta Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka V dan VI, yang mengatur pola hubungan yang ada pada sistem pemerintahan demokrasi presidensiil, maka UUD 1945 menganut Sistem Pemerintahan Presidensiil. Tetapi apabila dilihat ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka III butir 3, maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 juga mengandung ciri-ciri parlementer. Dengan demikian UUD 1945 lebih tepat dikatakan menganut Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensiil Tidak Murni (Kuasi Presidensiil) atau Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer

Tidak Murni (Kuasi Parlementer)(Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1976).

Pada saat itu implementasi demokrasi hanya terbatas pada interaksi politik di DPR (parlemen) dan berfungsinya pers yang sangat mendukung revolusi kemerdekaan. Hal ini dapat dimaklumi karena pemerintah harus memusatkan seluruh perhatian dan energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya, agar NKRI tetap eksis. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, bahkan partai-partai politik yang saat itu dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat pun lebih menjalankan fungsi utama ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan jalan menanamkan kesadaran untuk bernegara, serta menanamkan semangat anti kolonialisme dan imperialisme.

Pada periode kedua (1950-1959), berdasarkan UUDS 1950 pemerintahan NKRI mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer. Pada saat ini demokrasi mencapai kejayaannya karena hampir semua elemen demokrasi terwujud dalam kehidupan politik sehari-hari di Indonesia. DPR (parlemen) berperan besar dalam proses politik yang berjalan, akuntabilitas dari para pemegang kekuasaan dan politisi sangat tinggi, partai politik mendapat kesempatan yang besar untuk berkembang (yang ditandai dengan penerapan sistem multi-partai di mana terbentuk sekitar 40 partai politik yang memiliki otonomi dan tiadanya campur tangan pemerintah dalam urusan internal partai), berhasil dilaksanakannya pemilu (Pemilu 1955) yang

meskipun hanya satu kali tapi tercatat sebagai pemilu yang dilaksanakan dengan demokratis, diterapkannya asas desentralisasi di mana daerah mendapat otonomi yang cukup (daerah-daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerahnya masing-masing), serta tidak dikurangnya hak-hak dasar masyarakat meski belum semua warga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

Dari perjalanan waktu terlihat bahwa sistem pemerintahan yang melahirkan begitu banyak partai politik yang didominasi oleh orientasi ideologi yang tidak selalu sejalan dengan ideologi Pancasila (sebagai akibat politik aliran yaitu pemilahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berdasarkan pada agama, etnisitas, kedaerahan dan sebagainya, yang kemudian melahirkan partai politik) telah menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan politik dan persatuan bangsa terancam perpecahan, karena seringkali terjadi pemberontakan sebagai upaya untuk memaksakan penggantian Dasar Negara Pancasila, tidak berhasil dibangunnya pemerintahan yang kuat karena tidak ada partai politik yang mempunyai suara mayoritas yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet-kabinet yang dibentuk secara koalisi, dan belum kuatnya kondisi sosial (karena struktur sosial yang masih sangat hirarkhis yang bersumber pada nilai-nilai feodal) dan ekonomi (yang antara lain ditandai dengan masih kecilnya pendapatan perkapita dan urbanisasi).

Untuk mengatasi konflik yang berpotensi disintegratif bagi NKRI sebagaimana diutarakan di muka, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang

membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak saat itu berlaku era baru demokrasi dan pemerintahan yaitu Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin diwarnai oleh tarik-ulur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik yang ada yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat (AD). Dan proses politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan kebalikan secara total dari proses politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer, karena demokrasi pada masa tersebut tidak lain hanya merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka memposisikan diri sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Pada masa ini, sistem kepartaian mengabur karena partai politik lebih merupakan penopang dari tarik-ulur ketiga kekuatan tersebut di atas, parlemen (DPR GR) lebih merupakan instrumen politik Presiden Soekarno, terjadi sentralisasi kekuasaan dalam hubungan pusat dan daerah karena daerah hanya mempunyai otonomi terbatas, sejumlah majalah dan surat kabar diberangus, serta pengakuan dan perlindungan HAM menjadi lemah yang ditandai oleh mudahnya Presiden Soekarno menjebloskan lawan-lawan politiknya ke dalam tahanan. Titik kulminasi dari tarik-ulur atau pertarungan antara Presiden Soekarno, PKI dan AD adalah meletusnya Pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1958, yang menyebabkan tersingkirnya Soekarno dari panggung politik nasional dan memunculkan AD sebagai kekuatan politik yang sangat penting dan menentukan dalam proses politik selanjutnya dengan "Dwifungsi ABRI".

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Setelah melewati masa transisi yang singkat (1965-1968), NKRI memasuki masa pemerintahan Orde Baru (suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari pemerintahan sebelumnya di bawah Soekarno yang kemudian disebut dengan Orde Lama) di bawah Presiden Soeharto yang menerapkan Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila. Harapan akan adanya perubahan politik dari pemerintahan yang bersifat otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi pemerintahan demokratis pada masa Demokrasi Pancasila ternyata tidak tercapai. Selama Orde Baru, kekuasaan kepresidenan menjadi pusat dari seluruh proses politik yang terjadi di Indonesia, karena menjadi pembentuk dan penentu semua agenda sosial, ekonomi dan politik nasional. Presiden merupakan *primus inter pares* (yang utama dari yang setara). Karl D. Jackson (1978) menyebut Indonesia Orde Baru sebagai Negara Birokratik (*Bureaucratic Polity*) karena yang menguasai pengambilan keputusan politik negara hanya sekelompok kecil elite sedangkan rakyat hanya dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan saja. Rotasi kekuasaan terutama pada pucuk pimpinan nasional tidak pernah terjadi. Selama Orde Baru berkuasa, hasil pemilu tidak ada kaitannya dengan pembentukan eksekutif, dan lebih parah lagi proses rekrutmen politik yang masih tertutup (kecuali 400 orang anggota DPR yang dipilih melalui pemilu). Padahal menjadi keharusan dalam negara yang demokratis, semua warga negara yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan yang tersedia.

Selama Orde Baru, pemilu dapat dilaksanakan sebanyak enam kali dengan frekuensi teratur yaitu setiap lima tahun sekali,

tetapi kualitas penyelenggaraannya masih jauh dari semangat demokrasi, karena penyelenggaraannya dibuat sedemikian rupa sehingga dalam setiap pemilu Golongan Karya muncul sebagai pemenang dengan mayoritas mutlak, dan selanjutnya dapat ditebak kalau Golongan Karya berkembang menjadi partai politik yang dominan dan hegemonik. Mengenai apakah rakyat Indonesia dapat menikmati hak-hak dasar, sepanjang Orde Baru Indonesia selalu menjadi sorotan dunia internasional mengenai masalah kebebasan menyatakan pendapat, masalah kebebasan pers, dan diberlakukannya prinsip pencekalan terhadap sejumlah pihak yang dianggap berdiri berseberangan dengan pemerintah.

Dibandingkan dengan model demokrasi lainnya yang pernah diimplementasikan di Indonesia, Demokrasi Pancasila di bawah Orde Baru dapat bertahan kurang lebih tiga puluh tahun yaitu sampai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dengan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional.

Pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru di bawah Suharto, NKRI memasuki suasana atau tatanan kehidupan kenegaraan yang baru karena telah terjadi perubahan politik yang sangat luar biasa (*amazing change*) yang ditandai dengan terjadinya proses demokratisasi di segala bidang kehidupan (politik, ekonomi, hukum, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan dan sebagainya) yang berpuncak pada dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.

Masa transisi pasca tumbangnya Orde Baru tersebut ditandai dengan terjadinya perebutan pengaruh dalam menentukan

perubahan. Ada kelompok yang menghendaki supaya perubahan politik dilakukan secara revolusioner, ekstra-parlementer, dan inkonstitusional, serta tidak dengan mengikutsertakan elite politik era sebelumnya yang dianggap bertanggung-jawab atas semua persoalan bangsa yang kompleks yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua adalah kelompok yang menghendaki agar perubahan politik dilakukan secara bertahap, tertata, terencana secara matang, dengan melibatkan segenap elemen bangsa, dan dilakukan secara konstitusional (berdasarkan aturan main konstitusi dan peraturan perundang-undangan).

Dari sini terlihat adanya perbedaan antara transformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 dan seterusnya dengan transformasi politik yang terjadi pada tahun 1966. Transformasi politik yang terjadi pada tahun 1966 bersifat radikal karena untuk mengatasi persoalan bangsa yang sangat kompleks dilakukan *clean break with the past*, semua pejabat yang cacat politik dan ideologi disingkirkan. Sementara itu pada transformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 hanya terjadi "pergantian atau perubahan *regime* atau *orde*" yang lebih mengarah kepada pergantian pimpinannya atau kebijakan-kebijakannya, sedangkan implementasi demokrasi kurang menjadi fokus sasaran. Unsur-unsur yang berasal dari pemerintahan sebelumnya (Orde Baru) terutama para birokrat dan Golongan Karya masih banyak yang dipakai, yang menjadi penyebab masih bertahannya kebiasaan-kebiasaan lama yang kontraproduktif dan berakibat merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pada masa reformasi ini (sejak pemerintahan Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Susilo Bambang Yudoyono) terjadi perkembangan yang menggembirakan dalam kehidupan politik. Hampir semua indikator untuk adanya demokrasi terjelma dan terlaksana secara empirik dalam kehidupan politik masa reformasi, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Pertama, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi antara lain disebabkan oleh berfungsinya parlemen, berfungsinya sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial, aktifnya BPK dan KPK dalam pemberantasan korupsi, serta semakin kuatnya masyarakat madani. Kedua, lembaga perwakilan (DPR) dapat memainkan peranan yang cukup signifikan dalam proses politik yang berjalan. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh kesempatan yang sangat besar untuk berkembang secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah partai politik yang didirikan oleh warga masyarakat untuk menampung aspirasi mereka dan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan internal partai politik, semisal dalam rekrutmen pimpinan partai politik. Keempat, pemilihan umum yang demokratis, bebas, jujur, adil dan kompetitif dapat terlaksana. Pengalaman pemilihan umum yang sangat traumatik pada masa Orde Baru tidak terulang. Hal ini sangat menggembirakan dan membuat rakyat menjadi percaya pada pemerintah dan berharap agar proses demokratisasi tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik. Kelima, rekrutmen politik terjadi secara terbuka, karena semua orang yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama

untuk mengisi jabatan yang tersedia. Keenam, terjadinya rotasi kekuasaan. Terbukti dengan terjadinya pergantian pucuk pimpinan nasional secara berkala berdasarkan hasil pemilihan umum. Dan ketujuh, rakyat dapat menikmati hak-hak dasar mereka, meskipun masih saja terjadi pelanggaran HAM di sana-sini.

Sayang sekali meskipun ada hasil positif yang dicapai tetapi proses demokratisasi pada masa reformasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan ketika "reformasi total" digulirkan, karena terjadinya *discrepancy* (perbedaan) antara *das Sollen* dengan *das Sein*, yaitu munculnya realitas negatif yang kontra-produktif terhadap proses demokratisasi, seperti konflik internal pada partai-partai besar yang mengarah pada disintegrasi partai yang menimbulkan *social and political distrust*, munculnya konflik antar elit penguasa, sering terjadinya tindak kekerasan massa yang bermaksud memaksakan kehendak, munculnya konflik di tingkat lokal yang bersifat horisontal seperti perkelahian antar desa/kampung dan sebagainya. Demokrasi telah mengalami anomali, dan berubah menjadi demokrasi anarkhi. Kasus meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara sebagai korban aksi anarkhis yang dilakukan oleh massa yang menuntut dikabulkannya pemekaran wilayah Tapanuli menjadi sebuah provinsi, menjadi bukti bahwa demokrasi ternyata memiliki sisi kelam. Diakui atau tidak, itulah wajah suram demokrasi Indonesia yang semestinya dapat mempraktekkan demokrasi yang lebih berkeadaban.

Hal tersebut memunculkan pertanyaan : demokrasi mana yang dituju dan diinginkan untuk diwujudkan oleh masyarakat NKRI? Lebih-lebih dalam perkembangannya demokrasi telah menjadi konsep yang *open-ended*, tidak ada lagi konsep demokrasi

yang berlaku umum karena tidak ada lagi sistem demokrasi ideal, apalagi setiap negara adalah unikum. Proses demokratisasi yang terlalu cepat tanpa perubahan budaya politik telah memakan korban. Hal ini telah menyadarkan kita bahwa proses demokratisasi seharusnya didahului dengan proses pembelajaran masyarakat yang dapat dilakukan melalui pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan yang baik. Agar warga masyarakat menjadi warga negara yang baik diperlukan pemimpin yang baik yang bisa memberikan teladan, kebijakan yang baik, dan kemampuan warga masyarakat itu sendiri untuk menyadari hak dan kewajibannya (Yudi Latif, 2009). Demokrasi harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif agar nilai-nilai universal demokrasi (demokrasi substansial) dapat diimplementasikan, sehingga NKRI tidak menjadi *non-state failure* atau negara-bangsa yang gagal. Hal tersebut menjadi tanggung-jawab partai politik dan perlu adanya *civil society* atau masyarakat madani yang kuat. Semua partai politik harus sehat, terinstitusionalisasi (memiliki sistem, *network*, dan infrastruktur yang kokoh), dan senantiasa melaksanakan fungsi-fungsinya (seperti fungsi pendidikan politik, pengkaderan, serta rotasi dan regenerasi elit politik) secara optimal. *Civil society* atau masyarakat madani (dalam mana aspirasi sosial politik warga masyarakat berada) harus mandiri dan kuat agar dapat berperan-serta secara aktif dan bertanggung-jawab dalam mendorong terjadinya proses-proses politik yang berkualitas menuju terciptanya demokrasi Indonesia (Idrus Marham, 2009) yang sesuai dengan ideologi dan budaya bangsa.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, dan demokrasi merupakan salah satu cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis). Gagasan dasar negara hukum adalah bahwa hukum negara harus dijalankan dengan baik (dalam arti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap hukum) dan adil (karena maksud dasar dari hukum adalah keadilan).

Menurut konsep kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Konsep negara hukum (yaitu *rechtsstaat* yang dikenal di kawasan Eropa Kontinental dan *the rule of law* yang berasal dari kawasan Anglo-Saxon) sama-sama lahir sebagai upaya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan, dan pada dasarnya juga mengarah pada sasaran yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Pada kedua konsep negara hukum tersebut terdapat persamaan yaitu adanya pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau supremasi hukum, adanya perlindungan terhadap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan memberikan kemungkinan pada individu untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagaimana mestinya.

NKRI menerima dan menganut konsep negara hukum. Hal ini bisa dilihat pada bunyi Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara Angka I yang menyatakan bahwa:

"Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)", dan Angka 1 butir 1 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)".

Meskipun keberadaan Penjelasan UUD 1945 kala itu masih dipersoalkan sebagai produk yang tidak sah, tetapi dari isi Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas menyebut adanya prinsip demokrasi serta pengakuan dan perlindungan HAM, sudah merupakan bukti bahwa NKRI menganut atau menerima prinsip negara hukum. Bahkan menurut Moh. Mahfud MD (2006), "adanya konstitusi (dalam hal ini UUD 1945) itu sendiri merupakan bukti pula bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum dan demokrasi, sebab secara *socio-legal* dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi".

Prinsip negara hukum yang dianut oleh NKRI adalah "Negara Hukum Pancasila" yang bersifat prismatik dan integratif, yaitu prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda (yaitu unsur-unsur dalam *Rechtsstaat*, *the Rule of Law*, konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil) dan diberi nilai keindonesiaan (seperti kekeluargaan, kebapakan, keserasian, keseimbangan dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia) sebagai nilai spesifik sehingga menjadi prinsip "Negara Hukum Pancasila". Prinsip kepastian hukum dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the Rule of Law*. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak.

IV. Idealisme Negara Hukum Yang Membahagiakan Masyarakat Indonesia

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam konsep negara hukum tercakup empat tuntutan dasar yaitu : 1) tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; 2) tuntutan bahwa hukum harus berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara; 3) harus ada legitimasi demokratis yaitu bahwa proses pembuatan atau penetapan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat; dan 4) negara hukum merupakan tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat (Frans Magnis Suseno, 1991).

Di samping itu, ada beberapa prinsip umum yang berlaku di negara hukum yaitu: 1) adanya perlindungan terhadap HAM; 2) adanya kelembagaan negara yang bersifat demokratis; 3) adanya suatu tertib hukum; dan 4) adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Pertanyaannya adalah apakah prinsip-prinsip umum tersebut telah tercermin dalam wawasan negara hukum Indonesia?

Dengan melihat bunyi pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip umum dan kerangka dasar negara hukum telah tercakup di dalam UUD 1945. Pertanyaannya adalah apakah prinsip-prinsip umum dan tuntutan-tuntutan dasar dari konsep negara hukum tersebut sudah tertampung dalam UUD 1945? Selanjutnya adalah apakah prinsip-prinsip umum dan tuntutan-tuntutan dasar yang tercakup dalam negara hukum itu dapat diwujudkan? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, ada baiknya terlebih dahulu kita cermati kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 yang membuka jalan bagi tampilnya

pemerintahan yang tidak demokratis yang mengancam implementasi prinsip-prinsip dan tuntutan-tuntutan dasar negara hukum.

Pertama, UUD 1945 membangun sistem politik yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga Presiden menjadi steril dari kekuatan kontrol dan penyeimbangan kekuatan dari luarnya karena tidak ada mekanisme *check and balances* yang ketat. Kekuasaan eksekutif yang kuat dan dominan dalam sistem pemerintahan Indonesia sering dibenarkan dengan menunjuk Pasal 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan kata lain, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. Memang mungkin dapat diterima bahwa untuk negara seperti Indonesia (yang terdiri atas beribu pulau, jumlah penduduk yang besar dan begitu beragam), sekurang-kurangnya dalam waktu yang cukup panjang akan memerlukan suatu pemerintahan eksekutif yang kuat karena perlu melakukan pembinaan kepada rakyatnya. Tetapi suatu pemerintahan eksekutif yang “kuat” tidak berarti suatu pemerintahan dengan kekuasaan mutlak. Lebih-lebih Penjelasan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “kekuasaan Presiden tidak tak terbatas”. Masalahnya adalah bagaimana membatasinya? Ketentuan-ketentuan tentang fungsi DPR, khususnya dalam hubungannya dengan Presiden, sebagai penjabaran keterbatasan kekuasaan Presiden, belum memiliki mekanisme operasionalisasi. Tidak jelas apa arti dan implikasinya, misalnya bahwa “Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR”, sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Umum UUD 1945.

Kedua, lembaga legislatif (yang secara praktis didominasi oleh Presiden) memiliki atribusi dan delegasi kewenangan yang sangat besar untuk menafsirkan lagi hal-hal penting yang ada di dalam UUD 1945 dengan peraturan pelaksanaan atau UU organik. Oleh karena kekuasaan Presiden sangat besar maka implementasi atribusi dan delegasi itu sangat ditentukan oleh kehendak-kehendak Presiden yang cenderung menimbun kekuasaan secara terus-menerus. Formulasi konstitusi yang partikulturalistik dan secara eksplisit menyerahkan hal-hal penting dalam bidang HAM untuk diatur dengan undang-undang dalam kenyataannya telah menimbulkan masalah besar bagi bangsa Indonesia. Melalui sistem politik yang *executive heavy*, pemerintah telah melakukan pembatasan yang sangat ketat atas penggunaan HAM di Indonesia dengan menggunakan atribusi dan delegasi kewenangan yang dimilikinya. Dalam pengembangan hukum dan perundang-undangan sebagai penjabaran UUD 1945 muncul masalah, khususnya yang menyangkut fungsi lembaga-lembaga negara, yaitu: (1) beberapa ketentuan dalam UUD 1945 belum difungsikan sepenuhnya terutama karena belum tersedia mekanisme operasionalisasinya; (2) masalah pengkajian undang-undang belum menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang berasaskan UUD NI 1945; dan (3) kelengkapan hukum dan perundang-undangan belum berarti berlangsungnya konsep negara hukum tanpa jaminan lebih besar akan *law enforcement* yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum.

Ketiga, UUD 1945 memuat pasal-pasal tentang kekuasaan yang ambigu (multitafsir) yang dalam prakteknya (sebagai akibat sistem presidensial yang dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde

Baru) telah mendorong terjadinya interpretasi secara sepihak karena tafsir yang dibuat oleh Presiden sajalah yang harus diterima sebagai tafsir yang benar dan mengikat.

Keempat, UUD 1945 terlalu menggantungkan pada semangat orang dengan pernyataan bahwa semangat penyelenggara negaralah yang akan menentukan baik buruknya negara. Padahal penyelenggara negara cenderung korup dan akan benar-benar korup jika tidak diletakkan di dalam sistem aturan main yang ketat membatasi kekuasaannya. Kecenderungan yang berkembang pada masa Orde Baru (terutama selama beberapa tahun terakhir menjelang pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden) adalah kurang berfungsinya lembaga-lembaga negara terutama DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atas lembaga eksekutif dan dalam menjalankan hak inisiatifnya, semakin kurang berfungsinya partai politik, serta lembaga peradilan semakin berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif, sementara di sisi lain kekuasaan semakin terpusat di tangan lembaga kepresidenan yang merupakan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya secara substantif Pemerintah Orde Baru tidak berbeda dengan Pemerintah Orde Lama pada masa Demokrasi Terpimpin. Perbedaan hanya terdapat pada dasar legitimasinya yaitu bahwa Soeharto memegang kekuasaan eksekutif karena dipilih oleh MPRS dan MPR serta selanjutnya terpilih melalui pemilihan umum, sedangkan Soekarno dipilih menjadi presiden karena dipilih oleh PPKI dan selanjutnya ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS tanpa melalui proses pemilihan umum sama sekali.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Realisasi Negara Hukum Indonesia, terutama pada masa Pemerintah Orde Baru, merupakan sektor yang paling lemah. Dalam hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, hukum tampil dalam citra yang buram. Hal tersebut disebabkan hukum lebih menjadi instrumen kekuasaan (karena ditentukan, dipengaruhi, dan diintervensi oleh politik dan kekuasaan) daripada sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan. Hukum dijadikan alat pembenar (justifikasi) atas kehendak pemegang kekuasaan sehingga tidak dapat memainkan peranan sebagai alat kontrol dan penjaga batas kekuasaan, padahal hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Seharusnya hukum itu *supreme* atas kekuasaan, sehingga terwujud supremasi hukum yang dicita-citakan. Padahal semangat yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru adalah semangat untuk kembali ke kehidupan yang konstitusional dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang menggariskan agar rakyat dan pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Orde Lama sudah mengajarkan bahwa ketika kekuasaan diletakkan di atas hukum, maka masalah ketidak-adilan mengedepan yang pada gilirannya akan menimbulkan *chaos* karena stabilitas yang ada sesungguhnya lebih bersifat artifisial. Pasca Pemilu 1971, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi otoritarian, kontrol dari luar kepada pemerintah melemah, produk hukum (terutama hukum publik) menjadi konservatif-represif, bahkan upaya penegakan dan

kepastian hukum juga menjadi lemah. Berbeda dengan Pemerintah Orde Lama yang menjalankan pemerintahan non-demokratis melalui pelanggaran-pelanggaran atas UUD 1945, dengan adanya atribusi kewenangan (di mana Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat UU bersama DPR), Pemerintah Orde Baru membentuk pemerintahan otoriter melalui rekayasa yang sah misalnya melalui UU yang dikerjakan bersama DPR.

Dalam perjalanan waktu, telah dilakukan empat kali perubahan terhadap UUD 1945. Hal tersebut menandai dilakukannya reformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang sekaligus dapat dilihat sebagai usaha bangsa Indonesia untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negara yang selama ini dapat dikatakan belum mengakomodasi tuntutan kebutuhan negara modern yang demokratis dan menghargai supremasi hukum.

Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 (yang meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal pada batang tubuh maka istilah *rechtsstaat* ikut ditiadakan) di mana prinsip negara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang tereksplisitkan juga dalam pasal-pasal UUD 1945, penerimaan Indonesia atas prinsip negara hukum menjadi lebih jelas.

Selain itu, dalam memahami suatu masalah yang berkaitan dengan hukum, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari "seperangkat bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama dan semuanya menuju pada tujuan bersama, di

tengah-tengah suatu lingkungan yang kompleks". Sejalan dengan pendapat Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dapat dianalisis ke dalam tiga komponen yaitu:

- 1) *Legal Structure* (struktur hukum) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum;
- 2) *Legal Substance* (substansi hukum) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum (berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan) yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- 3) *Legal Culture* (budaya hukum) yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya, bagaimana orang untuk menerima hukum atau sebaliknya;

dengan melihat pada apa yang selama ini terjadi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kemauan baik pembuat undang-undang (*legislator* atau *rule making function*) tidak dapat hanya dilihat dari tujuan pembuatan undang-undang yang bersangkutan, tetapi juga harus tercermin dan terjabarkan secara konsisten pada satu sistem kerangka undang-undang (baik dalam konsiderans, batang tubuh maupun dalam penjelasannya). Demikian pula akan tergantung pada aparat pelaksana atau penegak hukum atau *law enforcement officer* (yang terdiri dari lembaga eksekutif yang menjalankan penegakan hukum atau *rule application function*, dan lembaga yudikatif yang bersifat pasif karena menunggu datangnya

yustisiabel yang membutuhkan jasa peradilan) yang akan sangat menentukan realisasi dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* bagi semua warga negara. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan, kemauan, dan keberanian dari aparat pelaksana atau penegak hukum dalam penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bekerjanya hukum memang tidak hanya ditentukan oleh baik tidaknya produk hukum tetapi juga oleh komponen-komponen lain yang semuanya merupakan satu sistem, dan oleh karenanya harus menuju pada sistem hukum yang menjamin kehidupan hukum yang dapat membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya.

Bernegara yang didasarkan pada hukum yang supreme terhadap kekuasaan memang tidak mudah. Untuk mewujudkan hukum yang dapat membahagiakan masyarakat Indonesia, maka para pemegang kekuasaan pemerintahan harus memperhatikan “empat kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara” (Moh. Mahfud MD : 2006, 2009) sebagai suatu politik hukum yaitu :

- 1) Tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial
- 2) Didasarkan pada upaya membangun prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) dan prinsip nomokrasi (negara hukum) sekaligus, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3) Didasarkan pada upaya untuk membangun kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 4) Didasarkan pada prinsip theokrasi yang berkeadaban

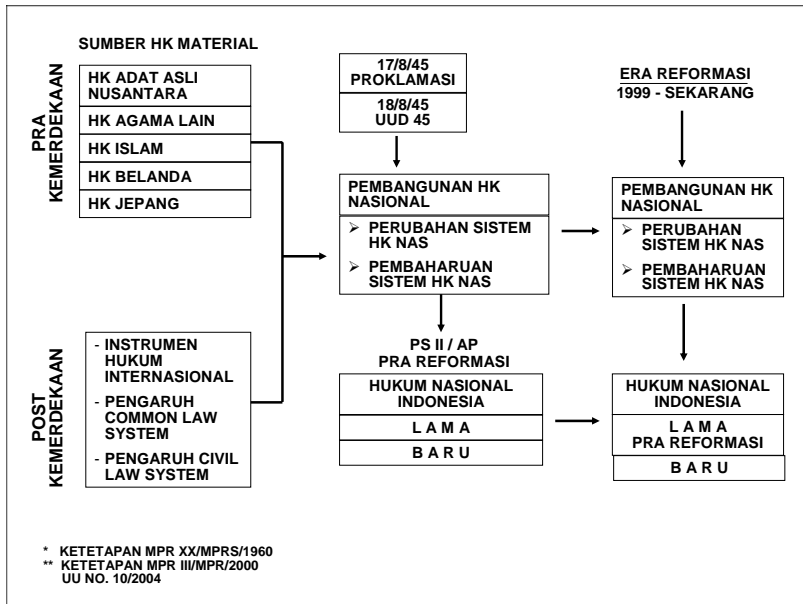
Dengan demikian prinsip lain yang juga harus dijadikan dasar pengelolaan negara selain prinsip theokrasi, demokrasi dan

nomokrasi seperti yang terkandung dalam empat kaidah penuntun diatas adalah prinsip ekokrasi. Prinsip ini harus diterapkan dan dipraktekkan oleh karena akan menjamin keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu yang panjang tidak hanya berusia ratusan tahun diharapkan dapat eksis sampai akhir jaman. Prinsip ekokrasi hendaknya dijabarkan dalam suatu *Green Constitution* dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam *Green Legislation* dan *Green Budgeting*.

Sistem hukum yang akan dibangun dalam negara Indonesia yang dapat membahagiakan masyarakat, juga harus memenuhi “empat kaidah penuntun hukum” yaitu:

- 1) Sistem hukum yang dibangun bertujuan untuk menjamin integrasi negara dan bangsa baik secara teritori maupun ideologi.
- 2) Sistem hukum yang dibangun harus berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik yang diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara dan hasilnya dapat diuji secara yuridis konsistensinya dengan *rechts ide*.
- 3) Sistem hukum yang dibangun harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- 4) Sistem hukum yang dibangun harus bertujuan menumbuhkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu (Moh. Mahfud M.D., 2009).

Sistem Hukum yang akan dibangun tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



V. Pesan Kepada Kolega Dosen Muda dan Mahasiswa Serta Ucapan Terima Kasih.

Hadirin Sekalian yang saya muliakan.

Perkenankanlah saya menyampaikan pesan untuk kolega saya para Dosen muda, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Secara jujur coba renungkan kembali motivasi awal saudara sekalian ketika memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Saya yakin saudara sekalian pasti ingin sekali menjadi seorang yang kaya raya di bidang ilmu pengetahuan dan untuk mencapai itu saudara sekalian harus selalu memegang teguh prinsip *long life education*. Saudara sekalian selama ini sudah berkompetisi secara sehat untuk mencapainya baik melalui jenjang formal maupun non formal, oleh karena itu susurlah terus kedua jalan tersebut. Tantangan saudara sekalian saat ini sebagai

seorang dosen adalah untuk mencapai jenjang akademik yang paling tinggi, sebagai prasyarat untuk menjadi seorang Guru Besar dan saudara semua mempunyai kesempatan yang sama untuk meraihnya, sekalipun saat ini telah beredar film 2012 yang menggambarkan keadaan dunia dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, yang menyadarkan pada kita semua bahwa kiamat memang absolut dan hanya tinggal menunggu waktu, tanpa seorang manusiapun yang tahu kapan kepastiannya.

Untuk para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor, kalian masih muda, masih mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang lebih besar dari dosen-dosen kalian untuk mengembangkan diri dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Ingatlah bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa yang akan datang ada di tangan kalian semua sebagai ahli hukum yang diharapkan akan membuat hukum yang membahagiakan masyarakat. Hukum dapat menjadi pengawal dan penjaga eksistensi negara kita untuk mencapai kejayaannya, tetapi sebaliknya hukum dapat pula menjadi bumerang yang menghancurkan negara kita apabila salah dalam pengelolaan dan penerapannya.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat ini.

Pada kesempatan ini pula perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional yang telah menyetujui dan mengangkat saya dalam jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Selanjutnya mohon perkenan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik sebagai Guru Besar ini. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And, Sekretaris Senat Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS dan seluruh anggota Dewan Guru Besar yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan memproses dan memberikan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Ketua Peer Group Prof. Dr. Yusriyadi, SH. MS dan Anggota Peer Group Prof. Dr. Lachmudin Syahrani; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH; Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH; Alm. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH; Prof. dr. H Soebowo, DSPA; dan Prof. Drs. Soedjarwo, atas koreksi dan masukan untuk kesempurnaan pidato pengukuhan ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat yang setinggi-tingginya saya sampaikan secara khusus kepada Begawan Hukum Indonesia, sekaligus Promotor saya, Alm. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH; atas asupan ilmu yang tiada henti-henti sampai akhir hayat beliau kepada saya sejak saya masih menjadi mahasiswa S1

sampai menjadi Guru Besar seperti sekarang ini. Begitu juga terima kasih atas keakraban dan perhatiannya yang sangat besar tidak hanya sebagai “guru” tetapi juga sebagai “bapak” kepada saya selama ini, dan saya selalu berdoa semoga Prof. Tjip mendapat tempat yang sebaik-baiknya di alam kekal di sisi Allah SWT.

Terima kasih dan hormat juga saya sampaikan kepada Alm. Prof. Soehardjo Ss., SH; Alm. Prof. Soedarto, SH; Prof. Dr. Moeljono Trastotenojo, Sp.A; Prof. Dr. Muladi, SH; Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc; Prof. Ir. Joetata Hadihardaja; Bapak Drs. Darjono Rahardjo, MM; dan Alm. Bapak Ir. Marwata Kusumapradana, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai muridnya, tidak saja dalam bidang keilmuan, tetapi juga dalam bidang kepemimpinan dan manajemen organisasi di Perguruan Tinggi, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum yang baik, kata sebagian besar mahasiswa.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Co-Promotor saya, Prof. Dr Moempoeni Moelatingsih M., SH; serta para Guru Besar yang telah menguji disertasi saya yaitu Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.; Prof. dr. H. Soebowo, DSPA; Prof. Mukti Fadjar, SH. MS (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI); Prof. Drs. Y. Warella, MPA.Ph.D; Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH; Prof. Dr. dr. Suharyo Hadi Saputro, Sp.PD; dan Prof. Dr. Drs. Gunawan Setiardjo.

Kepada rekan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. MH; yang saat ini bersama-sama dalam suasana yang membahagiakan ini, terima

kasih untuk segala dukungannya, sejak awal pengajuan usulan saya sebagai Guru Besar, sampai terbitnya Surat Keputusan pengangkatan saya sebagai Guru Besar. Kepada para Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kepada rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya di bagian Hukum Tata Negara, penghargaan dan terima kasih saya sampaikan dengan tulus atas kerja sama yang selama ini dapat berjalan dengan baik, serta atas dukungannya untuk segera mengajukan jabatan Guru Besar. Kepada para dosen senior Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada para senior saya di forum Dewan Ketahanan Nasional yaitu Bapak Marsekal TNI. M. Soebarkah; Bapak Letjen. Arifin Tarigan; Bapak Letjen Soekarto; Bapak Letjen. M. Yassin; Bapak Letjen Bambang Darmono; Bapak Mayjen. Basofi Soedirman; Bapak Mayjen. Naryadi; Bapak Laksdya Sugeng Rahayu; Prof. Dr. H. Achmad Syafi'i Ma'arif; Prof. Dr. Thomas Soejatno; Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.; Prof. Dr. Bagir Manan; Prof. Dr. Edi Suandi Hamid; Prof. Dr. Ichlasul Amal; Prof. Dr. Kunto Wibisono; Mayjend Albert Inkiriwang; Irjenpol Drs. Abu Bakar Nataprawira; Irjenpol Drs. Firman Gani; Prof. Dr. Idrus Affandi; Prof. Dr. Dedy Mulyasana; Marsma IGN. Narendra; Dr. AA.

Oka Mahendra, SH; Dr. Drs. Armaidi Armawi, M.Si dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas diskusi-diskusi yang intensif, sehingga memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan saya di bidang kenegaraan.

Ucapan terima kasih, sembah sungkem, dan kenangan yang tak terlupakan saya sampaikan kepada yang sangat saya hormati Alm. Eyang G.P.H. Soerjokoesoemo dan Alm. Eyang R.M. Rahayu, yang pada tahun 1980-an telah menyabdo bahwa saya kelak akan sampai pada jenjang Guru Besar serta mempunyai sepasang anak dan sekarang ini telah menjadi kenyataan. Beliau berdua pula yang telah banyak mewarnai falsafah hidup saya, sehingga saya memahami kehidupan sebagai orang Jawa yang njawani.

Ucapan terima kasih kiranya harus saya sampaikan pula kepada para Guru Besar senior di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Prof. Dr. Muladi, SH; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH; Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH; Alm. Prof. IGN. Sugangga, SH; Prof. H. Abdullah Kelib, SH; Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS; Alm. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH; Alm. Prof. Purwahid Patrik, SH; Alm. Prof. Soejono Soerjokoesoemo, SH; Alm. Prof. Dr. IS. Soesanto, SH; dan Alm. Prof. Dr. Soekemi, SH.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada istri tercinta Tundjung Herning Sitabuana, SH,CN,MHum, atas segala doa, pengorbanan, kesabaran, pengertian, kemarahan, bantuan dan dorongan semangat untuk menggapai jenjang fungsional akademik Guru Besar ini, yang sering saya tinggalkan sendiri di rumah untuk mendidik anak-anak, serta kepada kedua putra-putri tercinta Adya Paramita Prabandari, SH,MLI,MH dan

Airlangga Surjanagara, yang selalu memberikan inspirasi dan keteduhan dalam menjaga semangat untuk dapat mencapai jabatan akademik sebagai Guru Besar. Papa bangga pada kalian berdua, "nak". Lanjutkan perjuangan kalian untuk menggapai ilmu setinggi langit, tetapi jangan lupa untuk selalu "ngambah bumi" dan berdiri "di atas kaki sendiri" dan bahwa di atas sana ada Allah SWT yang tidak pernah "Sare", sebagaimana selama ini papa dan mama ajarkan kepada kalian berdua.

Kepada yang terkasih kedua orang tua saya, Alm. Bapak Chairul Asikin dan Almh. Ibu R. Ay. Srie Reni Ambarlia, atas laku prihatin siang malam beliau berdua yang telah membuat saya beserta keempat adik saya menjadi sarjana dan dapat hidup mapan di masyarakat, tidak ada satu katapun yang dapat mewakili untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya selama saya hidup dan menjalani kehidupan ini.

Kepada Bapak Ibu Mertua yang saya kasihi sekaligus saya hormati, Alm. Bapak Drs. R.M. Toeloes Koesoemaboedaja dan Ibu R. Ay. Koentjarawati, terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, dan bantuan yang selama ini diberikan sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini. Selanjutnya kepada keempat adik saya yang dengan penuh kasih sayang senantiasa mendorong dan mendoakan saya, hanya ungkapan terima kasih dari lubuk hati paling dalam yang dapat saya berikan. Demikian pula kepada kakak dan adik-adik istri saya, terima kasih atas segala doa dan dorongannya selama ini.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya

dan terima kasih yang setulusnya atas semua yang telah saya terima, dan yang pasti hanya Allah SWT yang akan membalasnya. Amin.

Akhirul kata saya ucapkan, Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Arief Hidayat

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, Tanri. *Dari Meja Tanri Abeng: Managing atau Chaos?, Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho dan Marco P. Sumampouw (Ed.). *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1997.
- Friedman, Thomas L. *The World Is Flat, Sejarah Ringkas Abad Ke-21*, Edisi Bahasa Indonesia (Ed. Agus Purwanto dkk) (Penerjemah: P. Buntaran dkk). Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia : Tradisi Menuju Dmeokrasi*. (Ed. : Kamdani) Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Nasional dan Global*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998.
- _____. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Hidayat, Arief. "Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia Pada Era Global", Pidato Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ke-41, 1998.
- _____. "Pembangunan Hukum Nasional (Reformasi Hukum Indonesia Menyongsong Era Global)". Makalah, 1999.
- _____. *Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 2006.
- _____. Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Penerbit : Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

- _____. "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 : Analisis Kritis Dari Perspektif Ketatanegaraan". Makalah Disampaikan Pada Seminar Dan Lokakarya Nasional Forum Komunikasi Dosen Dosen Pancasila. Semarang, 02 Nopember 2002.
- _____. "Beberapa Catatan Untuk Menyusun Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik". Makalah disampaikan pada Diskusi Publik Forum Tatap Muka dengan Organisasi Masyarakat, Semarang, 5 Juli 2007.
- _____. "Dewan Perwakilan Daerah (DPD) : Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Proses Rekrutmennya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Makalah disampaikan pada Workshop "Memahami Pemilu 2004" yang diselenggarakan oleh Redaksi Harian Umum Suara Merdeka, Semarang; Rabu, 28 Mei 2003, di Semarang.
- _____. "Evaluasi Dan Refleksi Pemilihan Umum Tahun 2004". Makalah disampaikan pada Diskusi Publik Forum Diskusi Wartawan Jawa Tengah, Semarang, 4 Juni 2005.
- _____. "Evaluasi Peraturan Perundangan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat". Pokok-Pokok Pikiran Disampaikan Pada Seminar Nasional *Inventarisasi Kebutuhan Perundangan Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat Di Masa Mendatang (Tahun 2020)*, Semarang, 22 – 23 Juni 2004.
- _____. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam". Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 17 - 19 Juli 2006 di Grand Candi Hotel, Semarang.
- _____. "Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". Makalah Disampaikan Dalam Stadium General Fakultas Syari'ah Iain Walisongo, Semarang, 3 Maret 2006.

- _____. "Kendala, Hambatan Dan Dukungan Pelaksanaan Peraturan Perundangan IPTEK Di Daerah Sebagai Bagian Dari Otonomi Daerah". Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Pengembangan Peraturan Perundangan di Bidang Iptek Dalam Upaya Penguatan Iptek di Daerah*, Semarang, 3 Agustus 2005.
- _____. "KIM/FIM Sebagai Jembatan Konsultasi Publik Bagi Anggota Legislatif/DPRD". Disampaikan pada *Diskusi Panel KIM/FIM* di Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2004.
- _____. "Menguatkan Keterwakilan Politik : Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah". Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "*Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD - RI Secara Kelembagaan*", diselenggarakan oleh DPD-RI, Jawa Tengah, Semarang, 12 Januari 2006, di Semarang.
- _____. "Otonomi Daerah Dalam Pemanfaatan BPHTB Untuk Pembangunan Daerah". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "*Mencari Format Imbal Balik Prestasi Bagi Masyarakat Dalam Pembiayaan Pelayanan Administrasi Melalui Hasil Pajak dan PNPB*", yang diselenggarakan atas kerjasama antara Fakultas Hukum UNDIP dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2 April 2007.
- _____. "Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Suatu Analisis Yang Dikaitkan Dengan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia)". Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Terbatas, yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-60 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), oleh Pengurus Cabang Jawa Tengah, Semarang, 9 Maret 2006.
- _____. "Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia (Dimensi Moral Dan Hukum)". Makalah Disampaikan Pada Lokakarya "*Pengembangan Dosen Serumpun*" Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 22 Maret 2006

- _____. "Penguatan Kelembagaan Mediasi Perbankan Dilihat Dari Perspektif Ketatanegaraan". Makalah Disampaikan Dalam Seminar Sehari Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Bank "*Mediasi Perbankan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Serta Peningkatan Peran Dan Fungsi Compliance Dan Pengawasan Oleh Bank*" Direktorat Investigasi Dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Kuta - Bali, 2 Agustus 2007.
- _____. "Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Upaya Non Litigasi Dan Litigasi". Makalah disampaikan pada Rakertas Dewan Ketahanan Nasional tanggal 5 – 7 Juni 2007, di Hotel Bumi Minang, Padang.
- _____. "Peran Partai Politik Dan Sistem Presidensial Dalam Demokrasi Pancasila, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Kesbanglinmas Jawa Tengah, Semarang, 24 Pebruari 2007.
- _____. "Peraturan Bank Indonesia Sebagai Peraturan Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Lembaga Mediasi Perbankan". Makalah Disampaikan Dalam Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Bank "*Mediasi Perbankan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Serta Peningkatan Peran Dan Fungsi Compliance Dan Pengawasan Oleh Bank*" Direktorat Investigasi Dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Semarang, 30 Nopember 2007.
- _____. "Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia". Makalah disampaikan pada Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD", Semarang.
- _____. "*The Indonesian Dream*". Makalah disampaikan pada Seminar "*Mengkaji Amanat Para Pendiri Negara*", Sabtu, 18 Maret 2006, di Semarang, diselenggarakan oleh LSM Journalist Fans Club (JFC) bekerjasama dengan AMPG Jawa Tengah.
- _____. "Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Kelembagaan Kementerian Negara Republik Indonesia". Makalah disampaikan pada Diskusi Panel di Kantor Menpan Republik Indonesia, Jakarta, 8 Desember 2005.

- _____. "Upaya Membumikan Pancasila". Makalah disampaikan pada Forum Koordinasi dan Konsultasi **"Implementasi Pancasila Dalam Rangka Memantapkan Persatuan dan Kesatuan"**, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 14-15 Nopember 2006.
- _____. "Analisis Kasus-Kasus Hak Asasi Manusia (10 Tahun Era Reformasi)". Makalah, 2008.
- _____. "Aspek Hukum LKPJ Kepala Daerah Menurut UU No. 32/2004". Makalah, 2007.
- _____. "Delapan Puluh Lima Tahun Pendidikan Tinggi Hukum (Disparitas Kualitas Pendidikan Hukum Di Indonesia) ". makalah disampaikan pada Forum Rapat BKS Dekan Fakultas Hukum se Jawa Tengah, di UNSOED Purwokerto, 2009.
- _____. "Politik Hukum Untuk Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Yang Efektif". Makalah, 2008.
- _____. "Posisi Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Undang-Undang Pemilu 2009". Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Semarang, 2007.
- _____. "Posisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kontribusi Pembangunan Budaya Berlalu Lintas : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Makalah disampaikan pada Forum Sosialisasi Kerja Sama Dirlantas Mabes POLRI, Jamsostek dan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2009.
- _____. "Prinsip Dasar Pengelolaan Negara Republik Indonesia". Makalah, 2007.

_____. "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional Di Era Global". Makalah disampaikan pada Ceramah Diklatpim Nasional Tk. II di Semarang, 2007.

Hirst, Paul dan Grahame Thompson. *Globalisasi adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Horsman, M. Dan Marshall, A. *After the Nation State*. London : Harper Collins, 1994.

Kennedy, Paul. *Preparing for The Twenty-First Century*, Edisi Bahasa Indonesia (*Penerjemah*: S. Maimoen). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Lafontaine, Oscar *et al. Shaping Globalisation, Jawaban Kaum Sosial Demokrat Atas Neoliberalisme*, Edisi Bahasa Indonesia (*Penerjemah*: Dian Pratiwi dan Fatchul Muin), Yogyakarta : Penerbit Jendela, 2000.

Muladi. "Pengaruh Kehidupan Hukum Terhadap Daya Saing Bangsa", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Refleksi Satu Abad Kebangkitan Nasional (1908-2008) dan Satu Dasawarsa Reformasi (1998-2008) Untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia di Era Global Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Bangsa", diselenggarakan oleh Lemhannas RI, Jakarta, 14 Mei 2008.

_____. "Globalisasi", Materi Kuliah "Transformasi Global (Bidang Hukum)" pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Angkatan XIII, Semarang, 30 Mei 2008.

_____. "Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", Makalah, *t. th.*

Ohmae, Kenichi. *The Borderless World*. London, New York : Collins, 1992.

_____. *The End of the Nation State, the Rise of Regional Economies*. New York: The Free Press, 1995.

Rahardjo, Satjipto. *Mendudukan Undang-Undang Dasar 1945*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 2007.

_____. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Cet. 1, Yogyakarta : Genta Press, 2008.

Rais, Mohammad Amien. *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia!*. Yogyakarta: PPSK Press, 2008.

Reich, R.B. *The Work of Nations*. New York : Vintage, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cet. 3. Jakarta: UI-PRESS, 1983.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta, PT. Gramedia, 1991.

CURRICULUM VITAE



Nama : Arief Hidayat
 Gelar Akademik : S.H., M.S., Dr. Prof.
 Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 3 Pebruari 1956
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : Dekan / Guru Besar
 Gol. / Pangkat : IV-D / Pembina Utama Madya
 Unit Kerja : Fakultas Hukum UNDIP
 Alamat Kantor : JL. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang
 Telp./Fax. (024) 8316870
 Nama Istri : Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,C.N.,M.Hum.
 Nama Anak : 1. Adya Paramita Prabandari, S.H.,MLI.,M.H.
 2. Airlangga Suryanagara
 Nama Orang Tua :
 - Bapak : Chairul Asikin
 - Ibu : R. Ay. Srie Reni Ambarlia
 - Bapak Mertua : Drs. R. M. Toeloes Koesoemaboedaja
 - Ibu Mertua : R. Ay. Koentjarawati
 Alamat Rumah : Komplek Mega Bukit Mas B. 16-18 Watugong
 Semarang, Telp. (024) 7464749
 Pendidikan Umum : SD, SMP, SMA di Semarang
 S1 - Fakultas Hukum UNDIP-1980
 S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNAIR-1984
 S3 - Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP-2006
 Pendidikan Tambahan/
 Kursus-Kursus/
 Pelatihan : 1. Teknik Perundang-Undangan UNDIP
 2. Penataran HTN, HAN UNAIR
 3. Course on Environmental Law and Mediation,
 UGM – ICEL
 4. Course on Legal Drafting, Indonesian-Netherlands
 Cooperation - Universitas Indonesia
 5. AMDAL - A UNDIP
 6. AMDAL - B UNDIP
 7. Penataran P-4 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
 8. Penataran P-4 Tingkat Nasional
 9. Akta Mengajar V UNDIP
 10. Pelatihan AA (Aplied Approach) UNDIP
 11. Refreshing Penatar AA (Aplied Approach) UNDIP
 12. Penataran Rekonstruksi Kuliah UNDIP
 13. Pelatihan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang
 dan Jasa
 14. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan
 Tinggi
 15. Workshop Badan Akreditasi Nasional Perguruan
 Tinggi

- Organisasi Profesi : 1. Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah
2. Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi & Konstitusi
3. Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia
4. Anggota Pusat Studi Hukum Kepolisian
5. Anggota Pusat Studi Hukum Lingkungan
- Bidang Keahlian : 1. Hukum Tata Negara
2. Hukum dan Politik
3. Hukum dan Perundang-Undangan
4. Hukum Lingkungan
5. Hukum Perikanan
- Pekerjaan : 1. Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP
2. Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum (S2 Ilmu Hukum) UNDIP
3. Staf Pengajar Prog. Magister Ilmu Lingkungan UNDIP
4. Staf Pengajar Prog. Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP
5. Staf Pengajar Prog. Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP
6. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S1 dan S2 di berbagai PTS di Jawa Tengah
7. Pengajar Kursus-kursus Amdal, Audit Lingkungan PPLH UNDIP
8. Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
9. Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi - DEPDIKNAS RI
- Riwayat Kepangkatan : 1. Calon Pegawai Negeri Sipil, III-A Tahun 1981
2. Penata Muda, III-A, Tahun 1982
3. Penata Muda Tingkat I, III-B, Tahun 1984
4. Penata, III-C, Tahun 1986
5. Penata Tingkat I, III-D, Tahun 1990
6. Pembina, IV-A, Tahun 1995
7. Pembina Tingkat I, IV-B, Tahun 2003
8. Pembina Utama Muda, IV-C, Tahun 2005
9. Pembina Utama Madya, IV-D, Tahun 2008
- Riwayat Jabatan : 1. Asisten Ahli Madya, Tahun 1982
2. Asisten Ahli, Tahun 1984
3. Lektor Muda, Tahun 1986
4. Lektor Madya, Tahun 1990
5. Lektor, Tahun 1995
6. Lektor Kepala, Tahun 2003
7. Guru Besar, April 2008
- Riwayat Jabatan Struktural : 1. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNDIP
2. Sekretaris Badan Koordinasi Mahasiswa (BKK) / Sekretaris Pembantu Rektor III UNDIP
3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNDIP
4. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNDIP
5. Dekan Fakultas Hukum UDNIP

- Pengalaman Pekerjaan Lain : 1. Aktif menjadi peserta Rakertas di Dewan Ketahanan Nasional 1997- sekarang
2. Aktif menjadi nara sumber di Departemen Dalam Negeri RI 2003-2009
3. Sekretaris Panitia Tim Seleksi KPU Provinsi Jawa Tengah 2008
4. Menjadi nara sumber di berbagai seminar, Lokakarya, pelatihan di tingkat Nasional dan Jateng
5. Nara Sumber pada Kursus Pimpinan Tingkat I.
6. Mitra Bestari Dewan Redaksi Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi UNNES
7. Mitra Bestari Dewan Redaksi Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Muh. Magelang
8. Mitra Bestari Dewan Redaksi Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember
- Tanda Jasa/ Penghargaan : 1. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, SK Presiden RI
2. Satya Lencana Pengabdian di UNDIP 25 Tahun
- Pengalaman Kunjungan Luar Negeri : 1. National University of Singapore
2. Universitas Kebangsaan Malaysia
3. Chulalongkorn University – Thailand
4. Groningen University – Belanda
5. Erasmus University – Belanda
6. Leiden University – Belanda
7. University of Wisconsin Law School-Madison-USA
8. Flinders University – Adelaide – Australia
9. Mahkamah Internasional – Den Haag – Belanda
10. University of Philipina – Manila
11. University of San Carlos – Cebu, Philipina
12. People Friendship University – Rusia
13. Bouwman University – Rusia
14. St. Petersburg University - Rusia
- Karya Ilmiah (*Lima Tahun Terakhir, Berupa Buku Dan Makalah*) : 1. Konsep-konsep Peningkatan Daya Saing Dilihat dari Pendekatan Hukum
2. Peranan KIM/FIM Sebagai Media Konsultasi Publik
3. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum
5. Implementasi Ideal Pasal 18 UUD Negara RI (Khususnya Tentang Pemerintahan Desa)
6. Sumbang Saran dan Kajian dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Politik atas Masalah Tanah Cakrawala, Kota Semarang
7. Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Kelembagaan Kementerian Negara RI
8. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Politik di Era Reformasi

9. Memperkuat Keterwakilan Politik : Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah
10. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Dimensi Moral dan Hukum)
11. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Analisis yang Dikaitkan dengan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia)
12. The Indonesian Dream
13. Paradigma Daya Saing Nasional dari Perspektif Hukum
14. Status dan Kedudukan Anggota DPRD Kab. /Kota Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
15. Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)
16. Kendala, Hambatan dan Dukungan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan IPTEK di Daerah Sebagai Bagian dari Otonomi Daerah
17. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
18. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Kuota Setengah Hati)
19. Implementasi Pasal 28 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Studi Yuridis – Historis Sejak Tahun 1945 – 2003)
20. Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Kritis)
21. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia
22. Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Pasal 28 UUD 1945
23. Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Nasional dan Global

